



KPU Kejar Verifikasi DPT Lewat Coklit

YOGYA, TRIBUN - Kunci sukses pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta 2017 adalah Data Pemilih Tetap (DPT) yang valid, sehingga tidak kecurangan maupun praktik kecurangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta terus mengejar batas akhir validasi DPT hingga awal Oktober.

Komisiner KPU Divisi Sosialisasi Sri Surani atau akrab disapa Rani mengatakan, upaya yang gencar dilakukan adalah melakukan pencocokan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Upaya itu memverifikasi DPT dengan mendatangi langsung pemilih di tempat tinggalnya.

"Petugas PPDP ini mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk mencocokkan data dan memverifikasi data riil lapangan," ujar Rani kepada *Tribun Jogja*, Selasa (20/9).

Rani menjelaskan, petugas coklit berfokus pada kegiatan memperbaiki, mencoret, dan menambah data pemilih. Petugas coklit dibekali DPT per-TPS. Teknisnya, petugas coklit memperbaiki data pemilih dalam dokumen DPT lama. Nantinya, dokumen daftar pemilih yang telah di-coklit diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diolah ke KPU.

Proses coklit-mencegah terjadi persoalan atau kerawanan dalam setiap pemilu, yakni data ganda. Proses verifikasi langsung ke lapangan diharap bisa meminimalisir potensi kecurangan melalui mobilisasi massa.

Proses coklit dimulai sejak 8 september 2016 dan berakhir pada 7 Oktober mendatang. Dari data yang diungkapkan oleh Rani, 10 kecamatan telah melaporkan progresnya dengan rata-rata telah di atas 30 persen proses verifikasi.

Baginya, hal itu terbilang cukup baik walau ada juga kecamatan yang belum mencapai 30 persen progresnya.

Respons minim

Rani menyebutkan, berbagai persoalan masih menghambat kerja petugas coklit atau PPDP. Persoalan tersebut antara lain kurangnya respons masyarakat bila petugas datang maupun ketidakhadiran warga ketika saat diverifikasi petugas.

Seorang petugas coklit atau PPDP Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta Nur Adi Widodo mengungkapkan, kesulitan yang lazim terjadi yakni pelacakan keberadaan warga. Banyak warga yang mempunyai KTP Kota Yogyakarta namun tidak berdomisili sesuai KTP-nya.

"Kalau yang seperti itu banyak, itu susah dilacak dan membuat verifikasinya tidak faktual. Banyak warga yang tidak berdomisili sesuai

KTP-nya," ujar Nur.

Di TPS 14 Kelurahan Pandeyan, jumlah DPT awal mencapai 339 orang. Saat ini, ia mengaku telah kerjanya mencapai 70 persen. Melalui proses coklit, akan banyak ditemukan data yang tidak sesuai atau bertambah, semisal banyaknya pemilih baru atau ada yang telah meninggal.

Rani juga berharap, masyarakat turut aktif dengan melaporkan ke KPU atau PPS bila merasa belum diverifikasi oleh petugas. KPU yang pada Selasa (20/9) siang menggelar garebek coklit, berupaya *monitoring* kerja PPDP dalam proses coklit.

"KPU terus berupaya menggiatkan partisipasi publik Yogyakarta dengan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan ketika belum dilakukan pemutakhiran data pemilih atau diverifikasi oleh petugas," tutur Rani. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005